

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, pada akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan manajerial pengelola dengan mutu pelayanan PKBM. Hasil analisis regresi ($Y=27,743+0,387 X1$) menunjukkan harga yang positif dan linier. Artinya bahwa semakin tinggi nilai kemampuan manajerial pengelola maka semakin tinggi pula nilai mutu pelayanan PKBM.

Hubungan kemampuan manajerial dengan mutu pelayanan PKBM berdasarkan hasil perhitungan korelasi adalah signifikan dengan determinasi 0,211. Artinya bahwa mutu pelayanan PKBM ditentukan oleh kemampuan manajerial pengelola sebesar 21,1%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa kemampuan manajerial pengelola dalam aspek berfikir, bersikap, dan bertindak dapat menjadi kontributor penting terhadap mutu pelayanan PKBM.

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja pengelola dengan mutu pelayanan PKBM. Hasil analisis regresi ($Y = 43,569 + 0,309 X2$) menunjukkan harga yang positif dan linier. Artinya bahwa semakin tinggi nilai motivasi kerja pengelola maka semakin tinggi pula nilai mutu pelayanan PKBM.

Hubungan motivasi kerja dengan mutu pelayanan PKBM berdasarkan hasil perhitungan korelasi adalah signifikan dengan determinasi 0,228. Artinya bahwa mutu pelayanan PKBM ditentukan oleh kemampuan manajerial pengelola sebesar

22,8%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa jika pengelola PKBM memiliki motivasi kerja yang kuat karena didasari oleh motif, harapan dan insentif yang memadai dapat meningkatkan pelayanan PKBM yang bermutu.

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi pengelola terhadap program pemberdayaan dengan mutu pelayanan PKBM. Hasil analisis regresi ($Y=40,199+0,416 X3$) menunjukkan harga yang positif dan linier. Artinya bahwa semakin tinggi nilai persepsi pengelola terhadap program pemberdayaan maka semakin tinggi pula nilai mutu pelayanan PKBM.

Hubungan persepsi pengelola terhadap program pemberdayaan dengan mutu pelayanan program PKBM berdasarkan hasil perhitungan korelasi adalah signifikan dengan determinasi 0,201. Artinya bahwa mutu pelayanan PKBM ditentukan oleh persepsi pengelola terhadap program pemberdayaan sebesar 20,1%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa jika program pemberdayaan terhadap pengelola PKBM dirancang dengan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi akan meningkatkan performance pengelola lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan PKBM.

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas gabungan (kemampuan manajerial, motivasi kerja, dan persepsi pengelola terhadap program pemberdayaan) dengan variabel terikat (mutu pelayanan PKBM). Hasil analisis regresi ($Y= 8,042+0,243X1+0,170X2+0,241X3$) menunjukkan harga yang positif

dan linier. Artinya bahwa semakin tinggi nilai variabel bebas gabungan maka semakin tinggi nilai mutu pelayanan PKBM.

Hubungan variabel gabungan (kemampuan manajerial, motivasi kerja, dan pemberdayaan pengelola) dengan mutu pelayanan program PKBM signifikan berdasarkan hasil perhitungan korelasi dengan koefisien determinasi sebesar 0,381. Artinya mutu pelayanan PKBM dapat dipengaruhi oleh variabel bebas secara bersama-sama sebesar 38,1 %, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Dapat diasumsikan bahwa jika kemampuan manajerial dengan motivasi kerja pengelola (faktor internal) dan program pemberdayaan (faktor eksternal) yang sama-sama membentuk sebagai variabel bebas kuat, maka akan meningkatkan mutu pelayanan PKBM yang kuat pula.

B. Implikasi

1. Implikasi Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian pengembangan keilmuan dalam dunia pendidikan luar sekolah, oleh karena itu perlu adanya suatu penelitian tindak lanjut yang lebih mendalam sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan pengembangan model pemberdayaan masyarakat dengan menitikberatkan pada pelibatan dan partisipasi masyarakat. PKBM dibentuk dengan tujuan untuk menumbuhkan motivasi belajar dan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedudukan setiap individu yang ada di masyarakat diperlakukan tidak hanya sekedar objek tetapi subjek pendidikan. Selain itu, pembentukan Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat pada hakekatnya adalah upaya pelibatan secara aktif setiap komponen masyarakat dalam meningkatkan komitmennya dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

Pelayanan program PKBM yang bermutu sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia pengelolanya. Upaya peningkatan kualitas pengelola melalui program pemberdayaan perlu dikembangkan dengan pendekatan dan metode yang lebih partisipatif, berkeadilan, mandiri, dan menjali kerja sama.

2. *Implikasi Kebijakan.*

Pengembangan PKBM hendaknya tidak hanya didasarkan pada orientasi kuantitas semata, melainkan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanannya. Untuk itu hendaknya para penentu kebijakan tidak mudah merasa puas terhadap laporan-laporan yang bersifat kuantitatif. Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan:

- a. Program pemberdayaan pengelola tingkat determinasinya terhadap mutu pelayanan PKBM lebih rendah dibandingkan dengan motivasi kerja maupun kemampuan manajerial. Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini program pemberdayaan pengelola PKBM di Kabupaten Garut, masih kurang serius. Pemerintah daerah Kabupaten Garut khususnya Dinas Pendidikan, hendaknya berupaya secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan kesadaran dan kinerja pengelola yang tanggap terhadap tantangan, kemandirian, partisipatif, kreativitas, serta inovatif.
- b. Sebaliknya, hubungan motivasi kerja yang merupakan faktor determinan dan terbesar dalam kontribusinya terhadap mutu pelayanan program PKBM di

Kabupaten Garut, hendaknya unsur motivasi kerja tersebut untuk tetap dipelihara konsistensinya, dan perlu diberikan *reward* yang memadai.

3. *Implikasi Praktis*

Prinsip dasar dalam membangun sikap partisipasi masyarakat adalah kesadaran dan tanggung jawab sosial atas suatu kegiatan yakni mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemanfaatan hasil yang telah dicapai dengan mengacu kepada prinsip-prinsip *community organization*. Dari hasil penelitian, diperoleh variabel program pemberdayaan memberikan kontribusi terhadap mutu pelayanan lebih kecil dibandingkan dua variabel bebas lainnya. Hal ini perlu adanya pengembangan program pemberdayaan yang lebih serius lagi dalam aspek-aspek berikut:

a. Perencanaan

Pengelola harus dilibatkan secara aktif dalam menyusun perencanaan yang matang karena perencanaan merupakan jawaban logis dan realistis terhadap permasalahan yang ada. Perencanaan sebagai proses yang senantiasa berorientasi pada masa mendatang (*future oriented*) dan ditujukan untuk mencapai tujuan dimulai dengan identifikasi potensi, identifikasi kebutuhan, mengolah data, menyeleksi kebutuhan, dan menyusun Rancangan Kegiatan Belajar.

b. Pelaksanaan

Pengelola harus mampu menumbuhkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik secara terencana dengan mengetahui beberapa hal yaitu tujuan, sasaran, waktu, isi

kegiatan, cara atau teknik yang digunakan serta sarana dan dana yang dibutuhkan.

c. Evaluasi

Pengelola dituntut terampil melakukan evaluasi pada tahap pra, proses, dan akhir kegiatan. Ruang lingkup yang dievaluasi terdiri dari penentuan kebutuhan belajar warga belajar, penentuan hubungan dan masalah program, evaluasi rencana, evaluasi pelaksanaan, evaluasi keluaran, dan evaluasi tindak lanjut.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Depdiknas (Pusat) dan Daerah (Dinas Pendidikan)

Untuk pemerintah pusat maupun daerah, hendaknya mampu menumbuhkembangkan potensi masyarakat serta bimbingan terhadap pengembangan PKBM yang berbasis masyarakat. Selain itu juga pemerintah pusat maupun daerah perlu memberikan *reward* yang memadai bagi mereka yang belajar secara aktif, kreatif, produktif dan penuh tanggungjawab dalam memajukan kepentingan hidup bersama, tanpa mengabaikan kepentingannya sendiri.

Peningkatan mutu pengelola PKBM dalam aspek kemampuan manajerial dan motivasi kerja yang dilaksanakan melalui program pemberdayaan hendaknya dilaksanakan secara serius dan berkelanjutan sehingga dapat menempatkan prospek PKBM di masa depan lebih baik lagi.

2. Universitas Pendidikan Indonesia

Untuk UPI khususnya untuk jurusan Pendidikan Luar Sekolah yang menjadi inovator sebagai lembaga akademis, hendaknya mampu memberikan keteladanan dalam pengembangan kreativitas yang produktif dan inovatif dalam pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini perlu menciptakan berbagai pengembangan model-model PKBM yang berbasis masyarakat dengan pendekatan *ilmiah dan religius* sebagaimana menjadi motto universitas tersebut.

3. Pengelola PKBM

- a. Bagi para pengelola PKBM, kebutuhan peningkatan mutu sumber daya manusia mutlak diperlukan, baik itu menyangkut peningkatan kemampuan (wawasan, pemahaman, dan keterampilan) maupun kesadaran dan *task commitment* yang kuat dalam melaksanakan tugas-tugas manajerial. Dengan demikian sebagai pemimpin akan mampu merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, membina, dan mengembangkan program-program PKBM. Kemampuan pengelola yang sangat penting dikembangkan dalam mengelola program-program PLS di PKBM adalah kemampuan mengidentifikasi kebutuhan belajar dan mengidentifikasi peluang pasar yang sesuai dengan potensi lokal. Kemampuan ini akan sangat membantu terhadap jalannya program yang berkesinambungan dan menghasilkan kemandirian warga belajar. Pemenuhan kebutuhan yang lebih banyak berorientasi pada insentif material dalam mengembangkan program di PKBM hanya akan mengikis motivasi bekerja. Karena wujud insentif lain seperti penghargaan dan pengabdian jauh lebih mulia dan bertahan lama.



